

Menelusuri Akar Sejarah Pluralitas Agama di Kota Sukabumi

Gian Fajar Gemilang,^{1*} Wawan Darmawan¹

¹ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*gemilanggianfajar@upi.edu

Dikirim: 16-04-2024; Direvisi: 05-09-2024; Diterima: 05-09-2024; Diterbitkan: 05-09-2024

Abstrak: Fenomena toleransi pada kehidupan sosial bermasyarakat menciptakan rasa rukun dan damai bagi umat beragama. Situasi sosial yang dinamis turut mempengaruhi sikap masyarakat dalam menyikapi pemahaman tradisi setiap umat. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi sejarah pluralitas agama di Kota Sukabumi dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi praktik beragama saat ini. Melalui pendekatan metodologi sejarah, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi apakah toleransi telah ada sejak masa kolonial atau merupakan konstruksi baru dari pemimpin dan penguasa saat ini. Hasil penelitian menunjukkan proses perkembangan masyarakat beragama di Kota Sukabumi terbentuk melalui peran tokoh agama sebagai pemimpin spiritual dan pembawa pesan perdamaian bagi masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah dan kebutuhan akan fasilitas peribadatan yang memadai turut berperan dalam menciptakan suasana inklusif bagi semua umat beragama. Regulasi terkait praktik religius dan tradisi juga memainkan peran penting dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama. Kerukunan ini diketahui muncul dari pemahaman yang dalam terhadap kepercayaan masing-masing dan rasa cinta yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia.

Kata Kunci: pluralitas agama; sejarah Kota Sukabumi; toleransi beragama

Abstract: The phenomenon of tolerance in social life creates a sense of harmony and peace for religious people. The dynamic social situation also influences the attitude of the community in responding to the understanding of the tradition of each community. This research attempts to identify the history of religious plurality in Sukabumi City with a focus on factors that influence current religious practices. Through a historical methodology approach, this research aims to identify whether tolerance has existed since the colonial period or is a new construction of the current leaders and rulers. The results showed that the development of religious communities in Sukabumi City was shaped through the role of religious leaders as spiritual leaders and messengers of peace to the community. In addition, government support and the need for adequate worship facilities contribute to creating an inclusive atmosphere for all religious communities. Regulations related to religious practices and traditions also play an important role in strengthening interfaith harmony. This harmony is known to arise from a deep understanding of each other's beliefs and a sense of love manifested in human relationships.

Keywords: history of Sukabumi City; religious plurality; religious tolerance



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Sikap empati dan menghormati antar umat beragama melahirkan situasi rukun dan damai yang dapat dirasakan di wilayah Kota Sukabumi. Dengan beragam etnis dan agama, masyarakat Kota Sukabumi disatukan melalui identitas sebagai kelompok sosial yang toleran (Saefullah,

2011). Perilaku toleran yang dibangun ini memungkinkan masyarakat bisa bersatu dan bekerja sama sebagai kesatuan dalam mosaik keberagaman budaya yang ada.

Sikap toleransi menjadi kunci pemahaman pluralitas masyarakat agar mendorong tumbuhnya rasa saling pengertian antar umat beragama (Mangantibe & Taliwuna, 2021). Toleransi beragama dikenal sebagai mekanisme sosial yang membantu umat menjaga suasana yang kondusif untuk kegiatan beribadahnya (Fitriani, 2020). Pada konteks ini, masyarakat Kota Sukabumi dengan karakteristiknya permisif, familier, dan bersahabat menciptakan rasa damai bagi setiap umat untuk beribadah (Saefullah, 2020). Fenomena ini kemudian menghasilkan situasi inklusif bagi seluruh umat beragama dan menciptakan dialog harmonis di antara mereka (Moko, 2017).

Dialog antar agama menjadi penting dalam masyarakat yang plural sebab akan membantu setiap umat beragama agar tumbuh lebih kokoh dan mantap dalam agamanya sendiri (Ali dalam Anwar, 2018). Dialog dapat menjadi jalan perjumpaan antar pemeluk agama tanpa merasa rendah ataupun tinggi, dan tanpa tujuan yang dirahasiakan (Anwar, 2018; Zuhriyah, 2012). Melalui proses komunikasi antar agama, kebebasan setiap agama dihargai. Bahkan proses ini merupakan titik temu berbagai perspektif setiap pemuka agama untuk saling memahami tanpa memaksakan pandangannya pada pihak lainnya (Albab, 2019). Lebih spesifik, proses ini akan meningkatkan rasa saling pengertian dan menghormati antar umat beragama (Anwar, 2018; Saefullah, 2020; Saumantri, 2023).

Dalam realitas masyarakat Kota Sukabumi, Saefullah (2011) menyatakan karakteristik umat yang berbeda turut andil menciptakan dinamika fluktuatif dalam masyarakat Kota Sukabumi. Karakteristik ini termasuk sifat yang akomodatif dan adaptif. Akomodatif merupakan kemampuan masyarakat mengenali dirinya sebagai masyarakat yang majemuk (Umanailo, 2016). Mereka cenderung dapat menghargai budaya di luar kelompoknya karena paham apa yang dilakukan, mengapa, dan masalah apa yang akan timbul dari perilaku tersebut (Budiyono, 2022). Perilaku akomodatif dalam keagamaan ini dapat dilihat ketika masyarakat dapat menerima praktik keagamaan berbeda yang mewadahi tradisi dan lokalitas yang dipercayai oleh masyarakat lainnya (Islamy, 2022; Munif et al., 2023). Sedangkan adaptif adalah kemampuan masyarakat menyesuaikan diri pada kondisi maupun situasi yang berkembang (Umanailo, 2016). Sikap eksklusif seseorang pada sesuatu yang dianggapnya tidak cocok sering kali menimbulkan persepsi tidak menghargai nilai yang berlaku. Sikap adaptif kemudian harus dimiliki umat agar dapat hidup beragama dan bermasyarakat secara baik bersama-sama (Yani, 2014).

Komunikasi antar agama di Kota Sukabumi juga menunjukkan adanya kerukunan yang baik dalam masyarakat (Saefullah, 2020). Hubungan internal dan eksternal umat beragama di kota ini cenderung positif, meskipun fluktuatif. Kota Sukabumi berhasil menempati posisi sepuluh besar dalam Indeks Kota Toleransi (IKT) selama dua tahun berturut-turut, yakni peringkat ke-6 dan ke-8 (Setara Institut, 2022; 2023). Indeks ini menilai kerukunan agama berdasarkan empat indikator utama: regulasi pemerintah kota, regulasi sosial, tindakan pemerintah, dan demografi sosio-keagamaan, yang mencerminkan bahwa toleransi agama di Kota Sukabumi tidak hanya sebatas fisik tetapi juga dalam pemahaman yang baik terhadap perbedaan (Saumantri, 2023).

Walaupun harmonisasi masyarakat yang dilandasi agama sering terlihat sejahtera, adakalanya muncul ketegangan yang tidak jarang memicu konflik keagamaan (Hanik, 2014). Beberapa konflik yang berkaitan dengan agama pernah terjadi di Kota Sukabumi, dan sebagian merupakan ancaman tinggi terhadap keberagaman. Namun masyarakat dan pemerintah yang berwenang berhasil mengatasi konflik dengan respons yang baik sehingga situasi dapat segera teratasi (Saefullah, 2020). Buktinya nyata penyelesaian konflik ini adalah penobatan Kota Sukabumi sebagai sepuluh besar kota toleran di Indonesia dan menjadi salah satu terbaik di Jawa Barat periode 2022 dan 2023 (Setara Institute 2022; 2023).

Beberapa penelitian terdahulu yang dibuat oleh Hutapea (2020), Hasrianti (2016), dan Saputra dan Tayib (2019) mendefinisikan makna pluralitas agama di beberapa kota yang berasal dari beberapa faktor. Hutapea (2020) melakukan kajian terhadap pluralisme dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang. Studi ini dilakukan dengan observasi pada fenomena keagamaan yang pernah terjadi pada masyarakat Kupang baik secara langsung maupun melalui media cetak dan sosial. Hasil penelitian memaparkan bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Salah satu cara yang dilakukan adalah meningkatkan pembinaan dan perhatian serius terhadap kerukunan beragama melalui instansi dan tokoh-tokoh agama sebagai perantara.

Hasrianti (2016) mengkaji konsep pluralisme agama dan budaya pada masyarakat Kota Sorong. Secara deskriptif peneliti menemukan bahwa nilai-nilai budaya berperan sangat kuat dalam membingkai pemahaman keberagaman masyarakat. Walau hal tersebut terkesan menciptakan sekat berbasis etnis, aspek sosial dan ekonomi kemudian menjadi perekat keberagaman masyarakat melalui falsafah dan nilai-nilai luhur yang dilestarikan.

Saputra dan Tayib (2019) membuat kajian terhadap makna dan pola komunikasi dari tiga agama terkait konsep pluralisme agama di pulau Lombok, Kota Mataram. Peneliti menemukan bahwa cara masyarakat untuk menjaga harmonisasi agama ini yaitu melalui falsafah "Panca Budaya Pluralis". Falsafah ini menekankan lima poin penting, yaitu memberikan hak kebebasan beragama, mengundang masyarakat belajar dan mengetahui tradisi keberagaman yang berbeda dari dirinya, melayat pada anggota yang wafat, saling berkunjung, dan saling berbagi.

Secara keseluruhan landasan teori terkait pluralitas agama mengacu pada kenyataan bahwa masyarakat terdiri dari beragam budaya dan agama, yang bersifat plural (Hanik, 2014). Istilah ini telah menjadi bahan perdebatan panjang dengan berbagai pandangan yang berbeda (Dzaki, 2014). Penting untuk membedakan pluralitas agama dari pluralisme agama, di mana pluralisme merujuk pada toleransi terhadap keberadaan agama lain tanpa mengklaim kebenaran mutlak agamanya sendiri (Armayanto, 2014). Pemahaman pluralitas agama ini, jika tidak hati-hati, dapat memicu radikalisme, sehingga dalam konteks ini lebih tepat diartikan sebagai kemajemukan atau keberagaman agama yang patut disikapi dengan sikap toleransi (Armayanto, 2014; Prasetyo, 2013; Purnomo, 2013; Rambitan, 2017).

Berdasarkan permasalahan dan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, penting untuk mempromosikan pemahaman antar kelompok agama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati (Handayani, 2023). Penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi dan merekonstruksi perkembangan pluralisme agama serta pencapaian harmoni di Kota Sukabumi melalui analisis peristiwa sejarah yang berdampak pada pemahaman keberagaman

masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan wawasan baru mengenai dinamika kerukunan antar agama di Sukabumi dari perspektif historis, yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan dalam memperkuat toleransi di masa mendatang. Penelitian ini menitikberatkan pada pentingnya memahami akar dan proses terbentuknya harmoni sosial-keagamaan di tengah tantangan modernisasi, guna memastikan keberlanjutan kerukunan di Kota Sukabumi.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sejarah dengan empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Sjamsuddin, 2007). Peneliti terlebih dahulu melakukan studi pustaka terkait dengan perkembangan toleransi beragama di wilayah Kota Sukabumi. Proses ini menjadi petunjuk awal peneliti menelusuri sumber lainnya. Tanpa adanya catatan maupun arsip terdahulu, proses penelitian akan terhambat dan memakan waktu tidak sedikit. Sumber kesejarahan yang ditemukan termasuk sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan yaitu, buku resmi pemerintahan "*Nederlandsche Zendingsvereniging 1915*" dan foto dan peta dari KITLV dan *Naational Museum van WereldCulturen*.

Selain itu sumber sekunder juga diperlukan untuk merekonstruksi data yang didapat dari berbagai media seperti artikel jurnal, arsip sejarah yang mendukung, dan wawancara pada para pemuka agama di tiga tempat ibadah yaitu Gereja Sidang Kristus, Mesjid Agung Kota Sukabumi, dan Vihara Widhi Sakti. Adapun keperluan wawancara narasumber didasarkan pada keperluan verifikasi saksi sezaman dan kesanggupan tokoh memaparkan situasi, ingatan, dan situasi sosial dengan latar belakang keagamaannya masing-masing.

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah uji kredibilitas melalui kritik internal dan eksternal. Proses ini mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sumber di antaranya siapa pembuat sumber, kapan sumber dibuat, mengapa sumber dibuat, apakah ada bukti lain yang menguatkan, seberapa cermat interpretasi dibuat, dan pertanyaan lain yang muncul ketika penelitian dilaksanakan. Sumber yang telah melalui proses kritik kemudian diinterpretasikan melalui proses analisis sesuai dengan kognisi pengetahuan peneliti terkait dengan pemahaman atas ilmu-ilmu sejarah maupun pendekatan dari ilmu sosial lainnya. Langkah terakhir adalah melakukan penulisan sejarah sesuai dengan kaidah kesejarahan yang berlaku.

Hasil Penelitian

Awal Keberagaman di Kota Sukabumi

Sukabumi sering kali dirujuk sebagai tempat yang nyaman untuk ditinggali. Nugraha (2017) menyatakan terdapat beberapa pendapat terkait asal nama Sukabumi. Pertama, Sukabumi berasal dari kata bahasa Sunda, *suka* dan *bumen* yang bermakna sebuah kawasan yang sejuk dan disukai untuk menetap. Kedua, *suka* dan *bhumi* yang dalam bahasa Sanskerta berarti bumi yang disukai. Namun banyak masyarakat merujuk Sukabumi pada sebuah wilayah yang tentram dan disukai. Adapun istilah Sukabumi merujuk pada dua daerah administratif, yaitu Kota Sukabumi yang berpusat di Cikole dan Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu.

Kota Sukabumi lahir dari dinamika sosial di masa Hindia Belanda. Perkebunan teh, rel kereta api, dan keberadaan orang-orang Belanda melahirkan Kota Sukabumi sebagai daerah

otonom yang memiliki budaya beragam (Firmansyah, 2017; Nugraha, 2017). Fenomena ini menjadi faktor penarik masyarakat dari berbagai latar belakang untuk datang ke Kota Sukabumi. Bangsa Eropa yang berdatangan berlomba menanamkan modal sebanyak-banyaknya. Etnis Tionghoa dan Pribumi tidak ingin kalah, mereka membuka toko dan mulai berdagang di sekitar wilayah kota. Adapun interaksi dari ketiga golongan masyarakat ini kemudian melahirkan kelas Indo yang tidak jarang lebih eksklusif dibandingkan dengan masyarakat pribumi, namun tidak melebihi bangsa Eropa (Firmansyah, 2017; Nisa' et al., 2021).

Keberagaman etnis di Kota Sukabumi telah dipikirkan secara matang oleh pihak kolonial Belanda. Mereka mengantisipasi penambahan penduduk dan pemberontakan khususnya pada masyarakat pribumi dan Tionghoa. Salah satu kebijakan yang diperkenalkan yaitu klasifikasi golongan berdasarkan etnis, termasuk segregasi antar tiga etnis Belanda, Tionghoa, dan pribumi (Ainurrahman, 2018; Firmansyah, 2017). Politik segregasi yang masuk ke dalam masa *Regering Reglement* (RR) dan *Indische Staatregeling* (IS) membagi masyarakat Hindia Belanda pada tiga golongan yaitu golongan masyarakat Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera (Hosniyah & Trilaksana, 2016).

Segregasi yang dilakukan pihak kolonial di Kota Sukabumi mengacu pada pembagian kota melalui batas jalan kereta api yang membentang dari Bogor – Cianjur. Firmansyah (2017) memaparkan jalur kereta api ini membagi masyarakat Eropa, Tionghoa, dan pribumi ke dalam tiga wilayah. Zona Eropa berada di utara sebagai pusat pemerintahan, zona Tionghoa berada di tengah (sekarang Jl. Ciwangi, Jl. Jend. Ahmad Yani, dan Jl. Pelabuhan) sebagai penggerak perekonomian, dan zona pribumi berada di sebelah selatan rel stasiun kereta dengan ciri perkampungan *babakan*. Namun demikian, pembagian zona tersebut tidak terlalu kaku karena tampak beberapa kampung pribumi juga ada yang tidak sesuai dengan batas-batas tersebut (Arip, 2016; Firmansyah, 2016). Akan tetapi pembagian golongan ini sangat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat kota terutama kebudayaan dari setiap wilayah yang dibatasi.

Sistem zonasi yang diberlakukan secara nyata memberi tanda pada setiap kelompok masyarakat. Etnis Tionghoa diwajibkan menjaga ketionghoannya dengan mengucir rambut mereka sehingga terlihat mencolok apabila berada di tengah masyarakat pribumi, di samping mencegah terjadinya persekutuan di antara mereka (Onghokham, 1991). Sedangkan masyarakat Eropa terkenal dengan usaha dan bisnisnya melalui investasi besar-besaran di berbagai sektor di kota Sukabumi (Nugraha, 2017). Juga sebagian besar masyarakat pribumi Sunda dengan pola perkampungannya turut mewarnai setiap sudut kota melalui cerita dan sifat tradisional yang masih kental (Firmansyah, 2017). Kota Sukabumi pada akhirnya berperan menjadi titik luluh (*melting pot*) beragam budaya dan bangsa yang turut mengubah kebijakan dan tradisi masyarakat yang ada di dalamnya (Ariwibowo, 2019; Firmansyah, 2016).

Perkembangan Awal Islam di Kota Sukabumi

Ketika menelisik perkembangan masyarakat Islam, tidak dapat dipungkiri dua hal utama yang menjadi dasar hidup. Pertama, kondisi keagamaan terkait *Hablumminnallah*, yaitu bagaimana masyarakat menjaga hubungannya dengan Allah melalui proses ibadah. Kedua,

terkait dengan *Habluminnannas*, yaitu kondisi keagamaan yang menyangkut hubungan sesama manusia (Arip, 2016).

Penduduk Jawa Barat menurut Hurgonje (2007) memiliki adat istiadat yang lebih sederhana bila berkaitan dengan islamisasi. Hurgonje (2007) menyatakan mereka lebih sadar diri dan yang beragama Islam yang keislamannya tidak terlalu bercampur dengan sisa-sisa peradaban masa lampau dan biasa disebut *Jâwah Sunda*. Sebagian besar tokoh-tokoh agama masyarakat Sunda berasal dari bekas kesultanan Banten, dan dirinya sebut mereka sebagai yang “terbaik” karena banyak menghasilkan guru Islam pertama dengan murid dan peziarah dari berbagai usia.

Sejak zaman dahulu, Islam di Jawa Barat dikembangkan oleh para kiai dan ajengan dengan meneruskan ajaran dari para Wali Songo, terutama ajaran dari sunan Gunung Djati (Sujati, 2020). Namun dalam prosesnya, transformasi kepercayaan Islam setidaknya melewati tiga tahapan. Bamualim (2015) memaparkan proses transformasi pertama dilakukan pada abad ke-16 hingga abad ke-18, dengan transisi masyarakat kerajaan Hindu Sunda ke pemerintahan Islam. Kedua, islamisasi yang terjadi di Jawa Barat berlangsung dengan sedikit perlawanan, namun tidak begitu signifikan seperti yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketiga, kemudahan bagi orang Sunda untuk mengadaptasikan doktrin dan norma-norma Islam ke dalam pandangan hidup dan adat istiadat mereka, khususnya bagi para tetua yang menciptakan pandangan dunia dan adat istiadat mereka agar bisa mudah dipahami oleh masyarakat sekitar.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Lubis (2011) yang menyatakan bahwa wilayah perkembangan agama Islam terbagi menjadi dua. Wilayah bagian timur memiliki pusat di daerah Cirebon dengan daerah penyebaran di Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Sedangkan di daerah barat berpusat di daerah Banten Selatan, Jakarta, Bogor dan Sukabumi. Perbedaan wilayah persebaran tersebut nyatanya mempengaruhi struktur sosial masyarakat, khususnya bagi Kota Sukabumi.

Wilayah Sukabumi yang dulunya merupakan alas (hutan) dan berkembang menjadi sebuah distrik perkotaan membawa pengaruh dari mayoritas masyarakat Islam yang tinggal dalam beberapa masa (Putri et al., 2023). Sukabumi sendiri baru berkembang sebagai sebuah pemukiman pada abad ke-19 sehingga peninggalan-peninggalan bercorak Islam relatif lebih muda dari wilayah lain seperti Demak, Cirebon, dan Cianjur (Shaleh, et al., 2013). Bahkan ketika seorang misionaris Belanda P.N. Gijssman datang ke Sukabumi pada 1872, dirinya memiliki persepsi awal bahwa Islam di Sukabumi hanya sebatas pakaian saja (Bamualim, 2015). Namun kemudian dapat diketahui bahwa praktik agama Islam pada masa itu telah mengakar dan menjadi falsafah hidup mayoritas masyarakat.

Pada masa kolonialisme Belanda, peranan masjid menjadi sentral bagi masyarakat khususnya dua golongan, yaitu penghulu dan kiai. Penghulu di masa Hindia Belanda berperan penting sebagai tenaga ahli hukum Islam juga menjadi seorang penasihat (Iqbal, 2012). Sedangkan kiai adalah seorang guru yang bertugas membina umat dengan saranan pendidikan Islam berbasis pesantren (Nasirin et al., 2023). Pemerintah kolonial menempatkan para penghulu mengatur masyarakat melalui masjid-masjid yang telah dipilih. Salah satu mesjid

yang menjadi fokus adalah Masjid Jamie Sukabumi oleh Raden Hadji Ahmad Djoewaeni (Arip, 2016).



Gambar 1. Masjid Jamie Sukabumi pada akhir abad ke-19
Sumber: (*Naational Museum van WereldCulturen*)

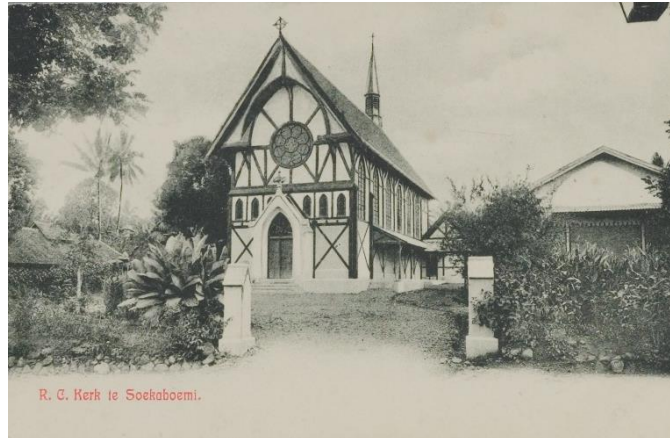
Informasi yang didapatkan terkait awal mula masjid ini dibangun masih simpang siur. Beberapa sumber menyatakan bahwa masjid ini berdiri pada akhir abad ke-19. Sumber lainnya menyatakan bahwa masjid ini telah dibangun pada tahun 1838 oleh leluhur Raden Hadji Ahmad Djoewaeni, yaitu R.H. Nu'man di atas tanah milik pribadi (Shaleh et al., 2013). Namun yang pasti, masjid ini menjadi satu-satunya masjid yang berdiri megah di tengah Kota Sukabumi.

Secara beriringan, para ulama dan kiai juga turut menjaga masjid-masjid dan lembaga pendidikan yang didirikan di berbagai sudut kota. Berbeda dengan penghulu, kiai dan ulama cenderung memiliki karakter yang lebih mandiri dan independen. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih dalam pada bidang agama dan memiliki gaya hidup lebih sederhana. Pada tahun 1866, ketika pemerintah melarang pegawai negeri untuk membantu pengumpulan zakat, penduduk cenderung memberikan zakat kepada kiai yang lebih dihormati dan dipercayai (Steenbrink & Rasjidi, 1984).

Pada masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan, beberapa kiai dan ulama menjadi teladan dan berkontribusi besar dalam pengembangan ajaran Islam. Mereka terbagi lagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja secara independen, dan yang bekerja berdasarkan perintah dari pemerintah (Arip, 2016). Para tokoh agama ini turut mendukung kuat islamisasi dan menciptakan kebangkitan gerakan keagamaan sehingga melahirkan lembaga pendidikan seperti pesantren yang berkembang pesat di lingkungan masyarakat (Bamualim, 2015).

Jejak Kemunculan Komunitas Kristen

Selain agama Islam agama kedua terbesar yang dianut oleh masyarakat adalah agama Kristen. Sezaman dengan Islam perkembangan agama Kristen di Kota Sukabumi dicirikan oleh banyaknya pembangunan gereja di masa Hindia Belanda. Pembangunan gereja-gereja tersebut tidak terlepas dari upaya kolonial Belanda mendukung kristenisasi dan mempertahankan doktrin agama Kristen yang tidak terlepas pada beberapa keringanan dalam aspek perekonomian dari pemerintah (Husaini, 2007).



Gambar 2. Gereja Katolik Roma di Sukabumi awal abad ke-20

Sumber: (KITLV, 1910)

Selain fokus dalam membangun beberapa gereja, mereka juga turut melahirkan sekolah, rumah sakit, hingga membuat kampung Kristen. Hampir keseluruhan upaya ini diinisiasi oleh organisasi *Nederlandsche Zendings Vereeniging* (NZV) (Putri et al., 2023; Sukamto, 2023). Untuk menyebarkan agama Kristen secara efektif, NZV sering memanfaatkan masyarakat pribumi sebagai pendeta pembantu di samping tokoh-tokoh Belanda (Mulyadi, 2019). Pendekatan ini dinilai berhasil memperluas jaringan Kristen di Kota Sukabumi karena dinilai lebih menjangkau dan mempermudah pemahaman tujuan dari tugas mereka melalui sudut pandang lokal (Putri et al., 2023).

Semangat penyebaran agama Kristen tersebut nyatanya tidak terlepas dari *Pietisme* yang muncul di akhir abad ke-17. Mulyadi (2019) menyatakan bahwa fenomena ini menyadarkan gereja akan tugasnya, selain sebagai tempat beribadah namun juga turut melaksanakan “Amanat Agung” untuk menyebarkan agama Kristen. Paham *Pietisme* dapat dilihat pada tindakan independen Majelis Agung bersama semua anggotanya berkomitmen menyebarkan kekristenan di antara orang Sunda. Dengan semboyan yang bersandar pada firman Juruselamat: „*Een is uw Meester, en gij zijt allen broeders*” atau “Satu adalah Tuanmu, dan kamu semua adalah saudara” memperjelas misi mereka bersama pribumi untuk berbagi tanggung jawab dan bekerja sama dalam menyebarkan agama Kristen (*Nederlandsche Zendingsvereeniging*, 1915).

Proses Kristenisasi yang dilaksanakan di Sukabumi juga memunculkan komunitas-komunitas Kristen yang terkumpul, salah satunya adalah kampung Kristen Pangharepan yang terletak 18 km dari Kota Sukabumi. Kampung tersebut diinisiasi oleh Simon van Eendenburg pada 1886 dan merupakan komunitas Kristen terbesar di Jawa Barat saat itu dengan jumlah pengikut sebanyak 272 jemaat (Bamualim, 2015; Firmansyah, 2017). Berbeda dengan cara NZV, melalui masyarakat lokal agama Kristen diperkenalkan dengan mencampurkan rasa rendah hati dan hormat terhadap identitas budaya masyarakat setempat. Perbedaan ini kemudian melahirkan sinkretisme dan corak Kristen yang berbeda dengan bangsa Belanda (Mulyadi, 2019).



Gambar 3. *Fröbelschool* dan sekolah menjahit milik
Perkumpulan Misionaris Belanda di Pangharepan, Sukabumi
Sumber: (*Nederlandsche Zendingsvereniging*, 1915)

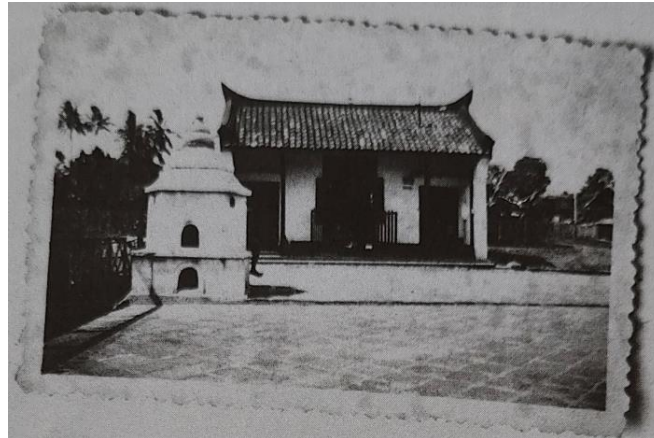
Awalnya NZV menargetkan orang lokal Sunda untuk kegiatan misionarisnya, tetapi di tahun-tahun berikutnya mereka juga mencoba memasukkan orang Tionghoa (Bamualim, 2015). Hal ini dikarenakan mereka menemukan banyak orang Tionghoa di pesisir utara telah memeluk agama Kristen (End, 2006). Penambahan fokus ini nyatanya menghasilkan peluang yang baik bagi mereka. Masyarakat Tionghoa yang beragama Kristen dengan peran sebagai Pekabar Injil mempermudah penyebaran agama Kristen di wilayah Kota Sukabumi karena stigma yang diciptakan masyarakat pribumi pada orang-orang Belanda. Putri (2023) menyatakan penyebaran Kristen yang dilakukan oleh orang Belanda (*urang Walanda*) pada masyarakat pribumi adalah bagian dari penjajahan. Maka dari itu, jemaat-jemaat Tionghoa menjadi penyelamat NZV menyebarkan agama Kristen melalui pendekatan personal yang dilakukannya, contohnya dengan datang ke rumah-rumah masyarakat (Putri et al., 2023).

Perkembangan Etnis Tionghoa dan Klenteng Bie Hian Hong di Kota Sukabumi

Meningkatnya jumlah orang Tionghoa yang masuk ke Sukabumi tidak terlepas dari dibukanya jalur kerta api yang melintasi kota (Febriana et al., 2021). Kedatangan orang-orang Tionghoa mulanya sebatas persahabatan dan perdagangan. Namun mereka kemudian menetap dan menikah dengan warga lokal sehingga menciptakan akulturasi budaya yang kental (Suryadinata, 1978). Kebijakan pembatasan etnis yang dilakukan tampak juga tidak membatasi percampuran budaya yang kemudian menghasilkan harmonisasi di antara mereka. Rasa ketionghoan yang masih lekat dijaga dan dilestarikan, termasuk nilai dan norma yang diwariskan (Febriana et al., 2021; Tan, 1979).

Keluarga Tionghoa yang tumbuh dalam lingkungan budaya ini secara menyeluruh menerima dan menganut kepercayaan agama tradisional yang mereka bawa. Kebanyakan dari mereka masih melaksanakan penghormatan terhadap nenek moyang, memiliki altar di rumah, dan rutin bersembahyang di kelenteng (Firdaus, 2020). Hal tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi mereka untuk membangun tempat ibadah di Kota Sukabumi. Salah satu

tempat ibadah yang didirikan adalah Klenteng Bie Hian Kong atau dengan nama lain Vihara Widhi Sakti yang terletak di Nyomplong, Warudoyong, Kota Sukabumi.



Gambar 4. Kondisi Vihara Widhi Sakti yang dibangun pada tahun 1912

Sumber: (Siong & Muliadi, 2012)

Pada zaman pendudukan Belanda, masyarakat biasa menyebut klenteng sebagai gereja (Herwiratno, 2007). Adapun asal kata klenteng juga masih simpang siur. Namun dugaan utama penamaan ini berasal dari kata ‘teng-teng-teng’ yang mencirikan umat datang untuk beribadah dan kemudian diberi nama klenteng (Wawancara dengan Dede, 21 Maret 2024).

Sejarah pembangunan klenteng Bie Hian Kiong tidak lepas dari legenda yang mengiringinya. Pada tahun 1911 terjadi hujan angin yang besar di tempat *Kongco* berada (Gudang Balok). Angin ini mencabut sebatang pohon bambu yang kemudian terbang dan menancap di daerah persawahan tempat yang sekarang menjadi klenteng. Konon fenomena ini adalah pertanda *Kongco* ingin memilih tempat sendiri. Maka pada tahun 1911, klenteng Bie Hian Kiong dibangun di tempatnya sekarang. Dari saat itu klenteng ini menjadi pusat kegiatan sembahyang bagi masyarakat Tionghoa (Wawancara dengan Dede, 21 Maret 2024). Klenteng ini secara umum memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah. Dengan mengikuti aliran Tri Dharma, klenteng Bie Hian Kiong memiliki arca-arca dewa dan dewi dari tiga aliran utama yaitu Daoisme, Konfusianisme, dan Budhisme. Dewa-dewi ini memiliki nilai-nilai moral yang dapat dijadikan teladan bagi para penganutnya (Gunardi, 2010; Wawancara dengan Dede, 21 Maret 2024).

Di Kota Sukabumi selain menjadi tempat peribadahan klenteng dan vihara tua juga memiliki nilai historis (Gunardi, 2010; Siong & Muliadi, 2012). Salah satunya dari segi fasilitas klenteng ini menjaga beberapa fasilitas yang telah berusia lebih 100 tahun. Penjagaan ini merupakan langkah pelestarian situs sejarah dan wadah budaya Tionghoa di Kota Sukabumi (Siong & Muliadi, 2012).



Gambar 5. Foto umat kelenteng di depan meja Thi-kong vihara tahun 1920.

Sumber: (Siong & Muliadi, 2012)

Adapun selain menjadi pusat budaya, kelenteng Bie Hian Kiong ini juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial. Umat kelenteng kerap mengadakan acara keagamaan, mulai dari bazar hingga perayaan Cap Go Me. Acara ini dilaksanakan beberapa hari dan kerap menarik banyak masyarakat Kota Sukabumi untuk menonton.

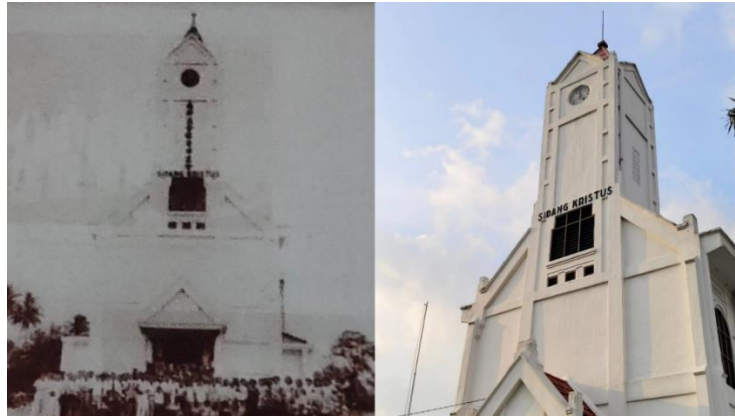
Ketiga agama ini secara tidak langsung memperlihatkan Kota Sukabumi yang memiliki karakteristik sebagai kota pluralitas agama harus bisa menjaga harmonisasi antar umat. Adapun situasi sosial, politik, dan ekonomi yang mencekam dan sering kali menjadi ancaman disharmoni masyarakat harus diperhatikan dengan dasar pemahaman dan komunikasi antar agama dalam bermasyarakat (Saefullah, 2011). Karena sifatnya yang dinamis beberapa kasus intoleransi tercatat mencederai umat beragama di Kota Sukabumi dan sebagian di antaranya mengancam keberagaman dan keberagaman masyarakat baik dalam lingkup lokal hingga nasional.

Kasus yang Mengancam Harmoni Agama di Kota Sukabumi

Kota Sukabumi memiliki pola kesadaran keagamaan yang lebih dari sekadar fisik, namun juga kesadaran masyarakat yang saling berinteraksi dengan harmonis dan penuh toleransi (Saumantri, 2023). Akan tetapi permasalahan-permasalahan keagamaan tidak bisa dikesampingkan dan tampak beberapa kali muncul ketika kondisi politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan secara umum juga mengalami gangguan (Saefullah, 2020; Septiana, 2020). Salah satu permasalahan yang pernah muncul yaitu pembatasan etnis Tionghoa dalam beragama dan berbudaya pada masa Orde Baru di Kota Sukabumi.

Dengan keluarnya instruksi Presiden No. 14 tahun 1967, segala bentuk aktivitas agama, kepercayaan, dan adat istiadat dengan ciri khas Tionghoa tidak boleh diperlihatkan secara umum pada masyarakat seluruh Indonesia. Pembatasan ini dilatar belakangi peristiwa G30S yang terafiliasi dengan organisasi etnis Tionghoa yaitu Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) (Shandy, 20). Atas pemberlakuan peraturan ini, beberapa di antara masyarakat etnis Tionghoa berpindah keyakinan dan memilih agama lain seperti Kristen Katolik, Protestan, Budha dan Islam (Febriana et al., 2021). Fasilitas keagamaan salah satunya kelenteng Bie Hiang Kiong dibatasi geraknya dan diawasi secara ketat

oleh pemerintah. Beberapa ritual seperti sembahyang *Ceng Beng*, sembahyang *Cioko*, sembahyang *Se Jit*, *Tiong Ciu* dan sembahyang pada *Kongco*, dilakukan secara sederhana dan terbatas hanya dilaksanakan di klenteng (Siong & Muliadi, 2012). Bahkan dalam konteks lain, Gereja Sidang Kristus (GSK) yang difungsikan sebagai gereja bagi masyarakat Tionghoa Protestan juga diharuskan menanggalkan tulisan Mandarin yang besar melekat pada bagian depan gereja (Wawancara dengan Andreas, 28 Maret 2024).



Gambar 6. (kiri) Gereja Sidang Kristus (GSK) dengan tulisan Mandarin sekitar tahun 1940 dan (kanan) bangunan gereja saat ini setelah pembatasan budaya Tionghoa masa Orde Baru
Sumber: Data peneliti

Selama lebih dari tiga dekade, ruang gerak masyarakat Tionghoa di Kota Sukabumi dibatasi. Perayaan adat istiadat leluhur yang selalu diselenggarakan secara meriah setiap tahun dilarang dipertontonkan pada masyarakat publik. Adapun bila diketahui merayakan secara umum maka konsekuensi fasilitas yang dipertontonkan akan dirusak atau dibakar (Wawancara dengan Dede, 21 Maret 2024). Namun masyarakat etnis Tionghoa dapat bernafas lega karena Inpres No. 14/1667 kemudian diganti oleh Keppres No. 6/2000 pada masa presiden Abdurrahman Wahid dan masyarakat juga fasilitas klenteng dan vihara bisa beroperasi kembali secara bebas (Febriana et al., 2021).

Selain fenomena pembatasan etnis Tionghoa, isu pembakaran kitab suci Al-Qur'an oleh seorang oknum guru Kristen di sebuah sekolah juga muncul ke permukaan sekitar tahun 1980-an. Permasalahan tersebut membuat ketegangan umat beragama, khususnya bagi umat Islam dengan Kristen. Namun ketika dilakukan verifikasi oleh para tokoh agama Islam dan Kristen, isu pembakaran tersebut tidak pernah terjadi dan hanya dibesarkan oleh pihak yang ingin mengadu domba umat beragama (Saefullah, 2011).

Kasus lain yang kemudian menodai keberagaman tidak hanya lokal, namun nasional yaitu peledakan bom di beberapa tempat di Kota Sukabumi. Dua kali peledakan bom di tempat yang berbeda di Kota Sukabumi menjadi bagian dari serangkaian kasus peledakan bom yang terjadi di tahun 2000-2001. Pertama, peledakan yang terjadi pada jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) pada malam Natal tahun 2000 (Subhan, 2016).

“Peristiwa itu terjadi setelah salah seorang jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) membawa bingkisan pemberian dari seseorang dari Gereja HKBP kemudian

meledak di rel kereta api. Akibat dari peledakan tersebut, tercatat tiga orang yang membawa BOM tersebut meninggal dunia, dan tokoh-tokoh agama melayat ke rumah korban sampai pemakaman selesai” (Saefullah, 2020ss).

Belum selesai masyarakat dihantui oleh trauma peledakan bom pertama, peristiwa bom kedua terjadi pada bulan Februari 2001 di depan Gereja Sidang Kristus (GSK). Peledakan bom tersebut tidak sebesar peledakan yang terjadi beberapa bulan lalu, namun dari peristiwa ini masyarakat merasa terusik dan canggung berkomunikasi khususnya dengan orang-orang Kristen (Saefullah, 2011; 2020). Sejak insiden tersebut terjadi, muncul rasa saling curiga di antara umat beragama tentang siapa yang bertanggung jawab.

Fenomena maraknya peledakan bom ini dapat ditinjau dari konteks situasi yang mendasarinya. Fathun (2021) mengutip bahwa setiap manusia dengan keyakinan tidak dapat menerima perbedaan lebih suka dengan adanya kekacauan, karena hal ini menjadi bagian dari tujuan mereka memaksa aparatus negara melihat dan memperhatikan lebih jauh keinginan mereka. Terorisme menjadi dasar dari kedua perilaku ini, dengan dalih *labeling* suatu kelompok yang tidak bisa diterima secara agamawi (Subhan, 2016).

Berdasarkan permasalahan tersebut diketahui bahwa upaya perpecahan dan intoleransi akan hadir ketika muncul prasangka terhadap sebuah kelompok selain dari dirinya sendiri (Fitriani, 2020). Sikap seseorang dalam menghormati dan lapang menerima menjadi prinsip utama yang harus ditanamkan pada masyarakat yang plural (Pangeran, 2017). Hubungan interpersonal antar umat beragama yang terganggu akibat tidak mampu dan tidak mau menerima terhadap perbedaan menjadi cikal bakal terjadinya perpecahan dalam bermasyarakat.

Menjaga Pluralitas Agama di Kota Sukabumi

Tinjauan historis terkait harmoni agama muncul dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang telah dibangun beberapa abad yang lalu. Bukti dari harmonisasi ini yaitu lokasi Masjid Agung Kota Sukabumi (dulu Masjid Jamie Sukabumi) yang berdekatan dengan Gereja Sidang Kristus, bahkan bila ditarik garis lurus juga sejajar dengan Klenteng Bie Hian Kiong. Secara tidak langsung penempatan tempat ibadah ini menjadi contoh konkret praktik nyata kerukunan beragama dan toleransi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam setiap kegiatan keagamaan, ketiga tempat ibadah ini berperan dengan harmonis mencerminkan esensi moderasi beragama yang menjadi prinsip dari masyarakat Kota Sukabumi (Miharja & Mulyana, 2019; Saumantri, 2023).

Dalam sudut pandang sejarah prinsip masyarakat Kota Sukabumi yang dituangkan dalam semboyan *”reugreug pageuh, repeh rapih”* memberi makna bahwa masyarakat ingin selalu hidup damai dengan siapa pun, tidak peduli latar belakang hingga agama namun dapat saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain (Saefullah, 2020). Konsep *reugreug* menjadi gambaran sikap warga yang merasakan kedamaian dengan menganut dan mengamalkan nilai-nilai agama. Ikatan religius ini kemudian terikat secara kuat (*pageuh*) dan menjadikan masyarakat memiliki sifat *repeh* dengan saling menghormati dan menghargai juga *rapih* dalam kesadaran beragama di antara masing-masing umat (Arief, 2022).

Para tokoh agama memiliki tanggung jawab memberikan pencerahan pada jemaatnya tentang prinsip moderasi dalam kehidupan beragama di Kota Sukabumi. Saumantri (2023)

menekankan pemahaman terhadap kebijaksanaan dan menghindari sifat fanatisme yang dapat merusak hubungan antarumat beragama. Dengan memahami dan menerapkan prinsip moderasi keberagamaan ini, masyarakat dapat menghindari ekstremisme dan sikap intoleran, sambil menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keanekaragaman agama dan tradisi menjadi pintu masuk dialog dan kerjasama antar umat beragama. Fenomena ini memungkinkan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi berbagai isu sosial dan moral yang melintasi batas-batas keagamaan. Adapun salah satu langkah yang bisa dilakukan yaitu dengan berdialog secara intensif dan mencari jalan tengah dari setiap permasalahan antar agama.

Pemerintah sebagai fasilitator dapat menggunakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menampung aspirasi umat beragama memecahkan masalah secara bersama-sama. FKUB di Kota Sukabumi sendiri setidaknya memiliki tiga tugas utama yaitu; pertama, melakukan mediasi untuk berkomunikasi dan berdialog secara intensif. Kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi umat beragama dan ormas keagamaan sebagai bahan masukan kepada pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan. Ketiga, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan nasib umat beragama (Saefullah, 2020ss). Apabila pemahaman yang dimiliki oleh para penganut agama tidak terkontrol dan terkendalikan, maka situasi tersebut menjadi rentan terhadap munculnya kesalahpahaman, saling menghina, merendahkan, dan berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengarah pada konflik (Miharja & Mulyana, 2019). Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui FKUB dalam urusan keagamaan menjadi suatu langkah untuk menjaga hubungan antara para penganut agama tetap harmonis dalam sebuah komunitas bangsa yang damai dan toleran. Ini berarti adanya saling penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak keagamaan masing-masing individu (Aqil, 2020).

Kesimpulan

Pluralisme agama di Kota Sukabumi muncul dari tokoh-tokoh agama yang senantiasa memberikan contoh dan petuah bagi masyarakat. Para tokoh juga bertugas sebagai pasak-pasak keberagamaan dalam masyarakat. Mereka menjadi media harmonisasi sebab pemahaman yang tinggi terhadap agamanya dan rasa kerukunan yang muncul terhadap umat lainnya setelahnya. Misi religi dan dukungan pemerintah terhadap lembaga juga menjadi alternatif lain dalam proses penyebaran paham keagamaan. Adapun kebutuhan fasilitas peribadatan yang memadai menjadi alasan utama terciptanya kehidupan beragama yang damai dan tenteram. Regulasi terkait praktik religius dan tradisi juga menjadi poin penting dalam menciptakan keberagaman. Pembatasan tradisi keagamaan tampak menjadi luka yang tidak bisa terobati melalui alternatif apa pun. Kebebasan masyarakat menunjukkan bahwa praktik agama tidak dapat terlepas dari aspek sosial dan budaya yang tumbuh bersama mereka. Adapun semboyan yang dipercaya sebagai simbol masyarakat membentuk pemahaman yang disebut sebagai toleransi. Apabila makna toleransi sudah mengakar dalam situasi bermasyarakat maka kekeliruan pemahaman antar umat beragama akan berkurang.

Pada akhirnya kerukunan antar umat beragama muncul dari pemahaman masyarakat terhadap kepercayaannya dan bagaimana masyarakat bisa menyalurkan rasa cinta mereka pada

umat beragama yang lain. Masyarakat tidak hanya menjaga hubungannya dengan Tuhan namun juga ikatan sesama manusia.

Daftar Pustaka

- Ainurrahman, M. (2018). *Analisis Kebijakan Sosial-Politik Pemerintah Hindia Belanda Untuk Etnis Tionghoa di Jawa Tahun 1900-1942*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Albab, A. U. (2019). Interpretasi Dialog Antar Agama Dalam Berbagai Prespektif. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(1), 22–34. <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.223>.
- Anwar, M. K. (2018). Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia: Perspektif A. Mukti Ali. *Jurnal Dakwah*, 19(1), 89–107. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/1347>.
- Aqil, M. (2020). Nilai-nilai humanisme dalam dialog antar agama perspektif Gus Dur. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 52-66. <https://doi.org/10.21580/wa.v6i1.4915>.
- Arief, A. Johari. (2022). Makna Unsur Visual Lambang Daerah Kota Dan Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dasarupa: Desain Dan Seni Rupa*, 2(1), 18–24. <https://doi.org/10.52005/dasarupa.v2i1.110>.
- Arip, U. (2016). *Gambaran Kehidupan Keagamaan Kota Sukabumi Masa Kolonial Belanda Tahun 1926-1942*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ariwibowo, A. (2019). Perkembangan Budaya Kosmopolitan Di Batavia 1905-1942. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(1), 55–74. <https://doi.org/10.33652/handep.v3i1.66>.
- Armayanto, H. (2014). Problem Pluralisme Agama. *Tsaqafah*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>.
- Bamualim, C. S. (2015). *Negotiating Islamisation and Resistance: A Study Of Religions, Politics And Social Change In West Java From The Early 20th Century To The Present* [Universiteit Leiden]. <https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2861948/view>
- Budiyono, A. (2022). Urgensi Konseling Komunitas dalam Menjaga Toleransi Beragama. *KONSELING: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapannya*, 3(3), 2686–2875. <https://doi.org/10.31960/konseling.v3i3.1662>.
- End, T. van den. (2006). *Sumber-sumber zending tentang sejarah gereja di Jawa Barat, 1858-1963*. BPK Gunung Mulia.
- Fathun, L. M. (2021). Tragedi Terorisme di Indonesia sebagai Bentuk Evolusi Ancaman Keamanan Nasional Tahun 2000-2010, Pendekatan Fenomenologi. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(1), 36-50. <https://orcid.org/0000-0002-8962-0075>.
- Dzakie, F. (2017). Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 9(1), 79-94. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v9i1.1408>.
- Febriana, W. F., Mahzuni, D., & Septiani, A. (2021). Kehidupan Budaya Etnis Tionghoa di Kota Sukabumi 1966-2002. *Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 4(2), 147–156. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/4388>.

- Firdaus, Y. F. (2020). Peran Orang-Orang Tionghoa Dalam Pekabaran Injil: Kajian Historis Terbentuknya Jemaat Tionghoa Di Jawa Barat. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen, Dan Musik Gereja*, 4(1), 77–97. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i1.120>.
- Firmansyah, I. S. (2016). *Soekaboemi The Untold Story*. Paguyuban Soekaboemi Heritages.
- Firmansyah, I. S. (2017). *Kota Sukabumi Menelusuri Jejak Masa Lalu*. Paguyuban Soekaboemi Heritages.
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 20(2), 179–192. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v20i2.5489>
- Gunardi, G. (2010). Identifikasi Potensi Kawasan Wisata Kali Pasir, Kota Tangerang. *Jurnal Planesa*, 1(1), 28–35.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44–63. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.154>.
- Hasrianti, A. (2016). Pluralisme Agama dan Budaya dalam Masyarakat Kota Sorong. *Jurnal Pusaka*, 4(2).
- Herwiratno, M. (2007). Kelenteng: Benteng Terakhir Dan Titik Awal Perkembangan Kebudayaan Tionghoa di Indonesia. *Lingua Cultura*, 1(1), 78. <https://doi.org/10.21512/lc.v1i1.264>.
- Hosniyah, & Trilaksana, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab Di Malang 1900-1935. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 966–978. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16265>.
- Hurgronje, C. S. (2007). *Mekka in the Latter Part of the 19th Century* (Translated by J.H. Monahan). Brill.
- Husaini, A. (2007). *Kristenisasi di Indonesia Tinjauan Historis dan Teologis*. 8–12.
- Hutapea, R. H., & Iswanto. (2020). Pluralism And Inter-Religious Harmony in Kupang. *Dilaog: Balitbang Kemenag*, 43(76), 99–108. <https://jurnaldialog.kemenag.go.id/index.php/dialog/article/view/363/190>
- Iqbal, M. (2012). Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 117–126. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.972>.
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.333>.
- Lubis, N. H. (2011). *Sejarah Perkembangan Islam di Jawa Barat*. Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- Mangantibe, V. Y., & Taliwuna, M. C. (2021). Toleransi Beragama Sebagai Pendekatan Misi Kristen Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 3(1), 33–47. <https://doi.org/10.37364/jireh.v3i1.56>.
- Miharja, D., & Mulyana, M. (2019). Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 3(2), 120–132. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v3i2.4717>.

- Moko, C. W. (2017). Pluralisme Agama Menurut Nurcholis Madjid (1939-2005) Dalam Konteks Keindonesiaan. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 13(1), 61–78. <https://doi.org/10.19109/medinate.v13i1.1542>.
- Moskee te Soekaboemi. (t.t.). Diakses [online] pada 28 Maret 2024 dari laman <https://collectie.wereldmuseum.nl/default.aspx?lang=en#/query/45fce3ae-8ad6-4d2e-8b3f-f5802443d995>.
- Mulyadi, R. M. (2019). “Elmu Anyar” Singkretisme Dalam Penyebaran Agama Kristen di Jawa Barat Pada Abad Ke-19 dan Awal Abad Ke- 20. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 11(2), 219. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i2.510>.
- Munif, M., Qomar, M., & AZIZ, A. (2023). Kebijakan Moderasi Beragama di Indonesia. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 417-430. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i2.935>.
- Nasirin, A. A., Sunarti, L., & Karwiti, W. (2023). Masalah Hygiene Di Pesantren Pada Masa Hindia Belanda XIX-XX. *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 4(2), 72. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v4i2.18800>.
- Nederlandsche Zendingsvereeniging. (1915).
- Nisa', S. F., Yoga, A. K. D., & Ridhoi, R. (2021). Terpinggirkan Di Tanah Kelahiran: Potret Kelompok Indo Di Hindia Belanda Abad Ke-19-20. *Historiography*, 1(2), 204. <https://doi.org/10.17977/um081v1i22021p204-212>.
- Nugraha, S. (2017). Kota Sukabumi dari Distrik Menjadi Gemeente (1815-1914). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 9(3), 423–438.
- Onghokham. (1991). Rakyat dan Negara. Pustaka Sinar Harapan.
- Pangeran, I. (2017). Toleransi Beragama Sebuah Keniscayaan Bagi Muslim Dalam Hidup Bermasyarakat. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 13(1), 31. <https://doi.org/10.24239/al-mishbah.vol13.iss1.76>.
- Prasetyo, A. (2013). Pluralitas Agama Dalam Keluarga Jawa. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(1), 64–73. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2374>.
- Purnomo, B. (2013). Toleransi Religius. *Suhuf: Jurnal Pengkaji Al-Quran Dan Budaya*, 6(1), 83–103. <https://doi.org/10.22548/shf.v6i1.36>.
- Putri, N. S., Salsabilla, A., Aqilah, R. N., & Arifin, F. (2023). Menggandeng Kolonialisme: Misionarisme dan Respon Umat Islam di Sukabumi Pada Abad 19-20. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 13(2), 12–34. <https://doi.org/10.15548/khazanah.v13i2.1091>.
- Rambitan, S. R. (2017). Pluralitas Agama Dalam Pandangan Kristen. *Jurnal Shanana*, 1(1), 93–108.
- Rianto, H. E., & Tayib, M. (2019). Pluralisme Agama: Studi Tentang Makna dan Pola Komunikasi Antar Umat Islam, Hindu, dan Budha di Pulau Lombok Kota Mataram. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 11(1), 37-73. <https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2276>.
- Rooms-Katholieke kerk te Soekaboemi. (Circa 1910). Diakses [online] pada 07 April 2024 dari laman

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/786705?solr_nav%5Bid%5D=ff55bb3d499862da2597&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0.

Saefullah, U. (2011). Dinamika Komunikasi dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (Studi Fenomenologi tentang Sikap, Perilaku Sosial, dan Komunikasi Antarumat Beragama di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 14(2), 93–110. <https://doi.org/10.20422/jpk.v14i2.171>.

Saefullah, U. (2020). *Komunikasi Lintas Budaya dan Agama*. Mimbar Pustaka.

Saumantri, T. (2023). Eksplorasi Makna Moderasi Beragama di Kota Sukabumi: Suatu Pendekatan Fenomenologis. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9(2), 187-205. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v9i2.8707>.

Septiana, T. (2020). Pembinaan civic disposition berbasis nilai-nilai kemanusiaan pada pembelajaran pendidikan kerwarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. *SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 18(1), 33–43. <https://doi.org/10.17509/sosio%20religi.v18i1.28725>.

Setara Institute. (2022). *Indeks Kota Toleran 2022*. Jakarta.

Setara Institute. (2023). *Indeks Kota Toleran 2023*. Jakarta.

Shaleh, M., et al., (2013). Masjid Agung dari Masa ke Masa. DKM Masjid Agung Kota Sukabumi.

Shandy, P. N. (2014). Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Budaya & Ekonomi Keturunan Tionghoa di Pecinan Semarang, 1967-2002. *Tesis*. Universitas Diponegoro.

Siong, R. J. T., & Muliadi, D. A. (2012). *Buku Peringatan 100 tahun Vihara Widhi Sakti (d/h Kelenteng Bie Hian Kong) Sukabumi (1912-2012)*.

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak.

Steenbrink, K. A., & Rasjidi, H. M. (1984). *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Bulan Bintang.

Subhan, M. (2016). Pergeseran Orientasi Gerakan Terorisme Islam di Indonesia (Studi Terorisme Tahun 2000-2015). *Journal of International Relations*, 2(4), 59–67. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/13409>.

Sujati, B. (2020). Tradisi Budaya Masyarakat Islam di Tatar Sunda (Jawa Barat). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(1), 37–51. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.29>.

Sukamto, A. (2023). The Role of Entrepreneurs in the Development of Protestant Christianity in East Java in the Nineteenth Century. *International Journal of Asian Christianity*, 6(2), 184–207. <https://doi.org/10.1163/25424246-06020003>.

Suryadinata, L. (1978). *Pribumi Indonesians, the Chinese minority and China: a study of perceptions and policies*. Heinemann Educational Books.

Tan, M. G. (1979). *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Gramedia.

Umanailo, M. C. B. (2016). *Ilmu sosial budaya dasar*. Fam Publishing.

Wawancara Pribadi dengan Andreas pada tanggal 28 Maret 2024.

Wawancara Pribadi dengan Dede pada tanggal 21 Maret 2024.

Yani, M. T. (2014). Meng-Agama-kan Masyarakat yang Telah Beragama. *Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 103-106. <https://lp2m.um.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/e.pdf>.

Zuhriyah, L. F. (2012). Dakwah Inklusif Nurcholish Madjid. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2(2), 219–240. <http://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/jki/article/view/5>.